



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 161 /Pid.C/2017/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : **RYSAN**;  
Tempat/tanggal lahir : Tg Batu Kundur / 12 Desember 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Pelita RT 002/002 Batam, Kepulauan Riau;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

KHALID SOROINDA, S.H., M.H. : Hakim  
LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H. : Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Selanjutnya Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Bali selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan tertanggal 28 Agustus 2017, No. BA/186/VIII/2017/PPNS/Sat.Pol.PP;

a. Keterangan saksi-saksi, **I KETUT SADAR, A.Md. S.Sos**, dan **I WAYAN SUTAMA, S.Pi**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 wita melaksanakan tugas penegakan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 telah melakukan Sidak bertempat di Pura Desa Lan Puseh Batuan Gianyar ternyata menemukan dan menangkap terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP sebagaimana setiap Pramuwisata Umum dalam melaksanakan tugas Kepemanduan wisata diwajibkan memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP;

Halaman 1 dari 3 Halaman



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **RYSAN** tersebut.

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya.

Mendengar keterangan saksi-saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI.**

1. Menyatakan Terdakwa **RYSAN** telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;
3. Menyatakan terdakwa **RYSAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi Pramuwisata dengan tanpa memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **3 (tiga) hari ;**
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ; **RABU**, tanggal 6 SEPTEMBER 2017,  
oleh: **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk  
oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari  
itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.**,  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

**LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.**

**KHALID SOROINDA, SH., MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)